

BAB III

REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP SERTA KETERLIBATAN CHINA DI DALAMNYA

Keikutsertaan China dalam RCEP telah menimbulkan banyak perdebatan diantara kalangan akademisi ilmu Hubungan Internasional. Keikutsertaan China dalam RCEP disebut-sebut sebagai upaya China untuk melawan kerja sama TPP yang dipimpin oleh Amerika Serikat. RCEP dianggap sebagai kendaraan China untuk mempertahankan dominasinya yang terusik oleh kehadiran Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik

Pada bab ini penulis akan memaparkan berbagai hal yang berkaitan dengan kerangka kerja sama RCEP. Pada bagian kedua pertama bab ini, penulis akan memberikan elaborasi terkait dengan kerangka kerjasama RCEP. Bagian kedua bab ini akan membahas bagaimana dampak yang dibawa oleh RCEP dalam regionalisme dan perdagangan dunia. Pada bagian ketiga dalam bab ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keikutsertaan China di dalam RCEP dimulai dari proses keikutsertaan, tujuan, dan keuntungan China dari kerja sama RCEP serta peran China dalam proses perundingan kerja sama RCEP.

A. Gambaran Umum RCEP

Regional Comprehensive Economic Partnership disebut sebagai sebuah “*mega regional economic agreement*” yang diinisiasi oleh sepuluh negara anggota ASEAN dan enam mitra FTA mereka yaitu Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan (Billaterals, RCEP, 2017). Secara total, enam belas negara yang tergabung didalam RCEP mencakup lebih dari 3 juta penduduk,

memiliki jumlah GDP gabungan sebesar 17 Triliun US Dollar, dan meliputi sekitar 40 persen dari perdagangan dunia. Jika negosiasi berjalan lancar, maka RCEP akan menjadi sebuah blok kerjasama perdagangan bebas terbesar di dunia dan akan memiliki dampak yang besar bagi negara-negara di Asia dan ekonomi dunia (Civildaily, Regional Comprehensive Economic Partnership, 2017).

1. Proses Kerja Sama RCEP

RCEP pertama kali diperkenalkan pada November 2011 disela-sela pertemuan ASEAN ke-19. Setahun berikutnya dibulan November tahun 2012 para pimpinan pertemuan ASEAN yang ke-21 di Phnom Penh, Kamboja mendukung kerangka kerja RCEP dan mengumumkan peluncuran negosiasi kerja sama tersebut. Perwakilan dari ke-16 negara anggota bertemu di Brunei Darussalam untuk membahas rencana negosiasi secara rinci yang dijadwalkan untuk selesai di akhir 2015. Putaran ke-6 RCEP *Trade Negotiation Committee* (TNC) dan pertemuan terkait lainnya dilaksanakan pada tanggal 1-5 Desember 2014 di New Delhi. Putaran ke-9 negosiasi RCEP dilaksanakan di Nay Pyi Taw, Myanmar pada tanggal 3-7 Agustus 2015. Kemudian pada Oktober 2015 putaran ke-10 negosiasi RCEP dilaksanakan di Korea Selatan (Eklavya's Jha IAS, Regional Comprehensive Economic Partnership, 2017). Meskipun telah dijadwalkan untuk rampung pada akhir Desember, proses perundingan RCEP mandek hingga jadwal perampungannya juga mundur. Menurut laporan harian *Today Online* perampungan kerja sama RCEP diundur hingga akhir tahun 2016. Langkah ini diambil setelah negosiasi yang telah melewati 10 putaran tersebut tidak juga menemukan titik temu kesepakatan diantara negara-negara yang berpartisipasi. Memasuki Desember 2016 perwakilan dari ke-16 negara anggota RCEP mengadakan rapat terakhir ditahun

tersebut untuk merampungkan kerja sama perdagangan RCEP. Progres dari negosiasi tersebut dilaporkan berjalan lambat, akan tetapi sebagaimana negosiasi ini sudah memasuki tahun 2017, proses perundingan sepertinya akan semakin dipercepat.

Memasuki tahun 2017, dengan harapan hanya tersisa sedikit proses putaran negosiasi, RCEP sudah harus memikirkan ulang strategi dan pendekatan mereka agar memperoleh hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Untungnya, terdapat beberapa faktor yang mendorong negara-negara anggota untuk lebih ambisius dan agresif. Pertama, ASEAN berkeinginan untuk menuntaskan proses negosiasi di tahun 2017 bertepatan dengan ulang tahun ASEAN yang ke-50. Kedua, sebagai pimpinan ASEAN di tahun 2017, Filipina ingin memimpin kesuksesan RCEP, pertemuan menteri RCEP akan bertepatan dengan pertemuan perwakilan senior ASEAN pada tahun ini di Filipina. Ketiga, pengunduran diri Amerika Serikat dari *Trans-Pacific Partnership* pada Januari lalu merubah perhitungan negara-negara anggota RCEP. Keempat, hingga saat ini China masih menjadi partisipan aktif didalam RCEP, tetapi bukan sebagai pemimpin negosiasi tersebut. ASEAN tetap pihak yang menyusun agenda negosiasi RCEP. Perwakilan senior yang bertanggungjawab atas negosiasi RCEP justru berasal dari Indonesia. Meskipun banyak laporan dari media yang dari awal menyebutkan bahwa RCEP merupakan kerja sama yang dipimpin oleh China. Kini dengan mundurnya Amerika Serikat dari kerja sama perdagangan di Asia, China memiliki segala insentif untuk meraih kesepakatan di RCEP. Selanjutnya China dipastikan akan memberikan perhatian khusus terhadap RCEP untuk memperoleh hasil perundingan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kepemimpinannya di ranah kerja sama

perdagangan global. Kelima, apabila TPP benar-benar gagal, tujuh negara yang tergabung baik didalam TPP maupun RCEP harus bertaruh dengan lebih hati-hati lagi mulai sekarang. Sejauh ini, tujuh negara tersebut (Australia, Brunei, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Singapura dan Vietnam) telah mampu mengambil pandangan yang lebih santai terhadap keseluruhan kualitas dari RCEP. Meskipun pada awalnya negara-negara yang juga tergabung didalam TPP tidak begitu menghiraukan apapun hasil akhir dari RCEP karena mereka dapat selalu bergantung pada TPP. Saat ini situasinya telah berubah, ketidakpastian TPP telah mendorong mereka untuk lebih memperhatikan hasil akhir dari proses perundingan TPP. Hasil yang buruk tidak dapat diterima lagi. Berikut ini adalah *timeline* proses negosiasi RCEP:

2. Prinsip-Prinsip Proses Perundingan RCEP

Pada proses negosiasi yang sedang berlangsung ini RCEP memiliki beberapa prinsip yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan proses perundingan tersebut. prinsip-prinsip tersebut disusun sebagai sebuah upaya untuk memperlancar proses negosiasi.

Prinsip yang pertama adalah RCEP akan konsisten terhadap peraturan WTO, termasuk Pasal XXIV GATT dan Pasal V GATT. Kemudian yang kedua adalah RCEP akan memiliki keterlibatan yang lebih luas dan mendalam lebih dari ASEAN+1 FTA yang sudah ada, sembari tetap mengakui keragaman serta kondisi individual dari negara-negara yang berpartisipasi.

Ketiga, RCEP akan meliputi aturan-aturan yang memfasilitasi perdagangan dan investasi dan untuk meningkatkan transparansi dalam kerja sama perdagangan

dan investasi diantara negara-negara yang berpartisipasi, serta memfasilitasi keterlibatan negara-negara yang berpartisipasi dalam rantai suplai regional maupun global.

Keempat, dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pembangunan diantara negara-negara yang berpartisipasi, RCEP akan meliputi aturan-aturan khusus dan penanganan yang berbeda, plus tambahan fleksibilitas bagi negara-negara anggota ASEAN dengan tingkat pembangunan yang rendah, dan konsisten dengan ASEAN+1 FTA yang ada. Kelima, ASEAN FTA dan FTA bilateral lainnya diantara negara-negara anggota akan tetap ada dan tidak akan ada peraturan di dalam RCEP yang dapat mengurangi syarat dan ketentuan dari FTA bilateral diantara negara-negara anggota tersebut.

Lalu prinsip yang keenam adalah setiap negara mitra area perdagangan bebas ASEAN yang tidak berpartisipasi di dalam RCEP diijinkan untuk bergabung setelah mendapat persetujuan diantara negara-negara anggota. Kerjasama RCEP juga akan memiliki klausul keterbukaan yang memungkinkan negara-negara mitra perdagangan bebas ASEAN yang tidak tergabung kedalam RCEP untuk bergabung setelah proses negosiasi dirampungkan. Setelah itu, ketentuan untuk bantuan teknis dan pembangunan kapasitas akan disediakan, pembangunan terhadap FTA ASEAN+1, bagi negara berkembang dan negara kurang berkembang yang berpartisipasi dalam RCEP untuk menjadikan semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif didalam proses perundingan, menerapkan peraturan dibawah RCEP dan menikmati manfaat dari RCEP. Kemudian yang terakhir adalah negosiasi terkait perdagangan barang dan jasa, investasi dan sektor lainnya akan dilakukan secara bersamaan untuk memperoleh hasil yang komprehensif dan berimbang.

3. Cakupan Kerja Sama RCEP

Sebagai sebuah kerangka kerja sama ekonomi, RCEP memiliki banyak sektor kerja sama yang akan dijalin nantinya. Sektor kerja sama yang paling jelas terlihat adalah sektor perdagangan barang. Pada sektor ini RCEP akan bertujuan untuk secara progresif mengurangi pajak terhadap semua perdagangan barang diantara negara-negara anggota untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Perundingan tarif akan dilakukan dengan dasar yang komprehensif. Negosiasi semacam ini akan bertujuan untuk mencapai liberalisasi tarif dalam level yang tinggi, melalui pembangunan terhadap level liberalisasi yang sudah ada saat ini diantara negara-negara partisipan RCEP dan melalui pengurangan tarif dengan persentase yang tinggi baik terhadap batasan tarif maupun terhadap nilai perdagangan. Perencanaan terhadap pengurangan tariff ini akan memaksimalkan keuntungan dari integrasi ekonomi kawasan.

Setelah perdagangan barang, yang tidak luput dari perhatian RCEP adalah sektor perdagangan jasa. Pada sektor ini RCEP akan secara komprehensif dan secara substansial mengurangi hambatan terhadap perdagangan jasa diantara negara-negara anggota TPP. Peraturan serta kewajiban mengenai perdagangan jasa dibawah RCEP akan tetap konsisten terhadap General Agreement on Trade in Services (GATS) dan akan diarahkan untuk tercapainya komitmen pembangunan liberalisasi diantara negara-negara anggota RCEP dibawah GATS dan ASEAN+1 FTAs. Semua sektor dan bentuk suplai akan menjadi bahan negosiasi.

Setelahnya, pada sektor investasi RCEP bertujuan untuk menciptakan sebuah iklim investasi yang liberal, fasilitatif dan kompetitif di kawasan. Negosiasi

untuk investasi dibawah RCEP akan mencakup empat pilar yaitu promosi, proteksi, fasilitasi dan liberalisasi.

Sektor Kerja Sama Ekonomi Dan Teknis juga masuk kedalam sektor kerja sama yang akan dijalin oleh negara-negara anggota RCEP. Kerja sama ekonomi dan teknis dibawah RCEP bertujuan untuk mempersempit kesenjangan pembangunan diantara negara-negara anggota dan memaksimalkan keuntungan bersama dari penerapan kerja sama RCEP. Ketentuan kerja sama ekonomi dan teknis RCEP akan dibangun berdasarkan ketentuan kerja sama ekonomi yang sudah ada diantara ASEAN dan mitra FTA ASEAN yang berpartisipasi di RCEP. Aktivitas kerjasama harus meliputi perdagangan alat elektronik dan sektor lainnya yang disetujui bersama oleh negara-negara yang berpartisipasi di RCEP.

Salah satu hal yang juga menjadi perhatian negara-negara anggota RCEP adalah Kekayaan Intelektual. Kerja sama di sektor kekayaan intelektual dalam RCEP akan bertujuan untuk mengurangi hambatan terhadap perdagangan dan investasi yang terkait dengan kekayaan intelektual dengan cara mempromosikan integrasi ekonomi dan kerjasama dalam penggunaan, proteksi dan pelaksanaan hak kekayaan intelektual.

Selain itu perundingan RCEP juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan Kompetisi diantara negara-negara anggota. Aturan terhadap kompetisi akan membentuk sebuah landasan bagi negara-negara anggota untuk bekerjasama dalam promosi kompetisi, efisiensi ekonomi, kesejahteraan konsumen serta pengurangan terhadap praktek anti-kompetisi sembari menyadari adanya perbedaan kapasitas yang signifikan dan rejim nasional dalam area kompetisi diantara negara-negara yang berpartisipasi di RCEP.

Setelah kompetisi, salah satu hal yang tidak kalah penting adalah adanya sistematisa Penyelesaian Masalah yang baik. RCEP akan mencakup mekanisme penyelesaian masalah yang akan memberikan proses yang efektif, efisien dan transparan untuk konsultasi dan resolusi permasalahan.

Berikut ini penulis lampirkan dokumen *Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership*:

Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership

Recognizing the ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), the objective of launching RCEP negotiations is to achieve a modern, comprehensive, high-quality and mutually beneficial economic partnership agreement among the ASEAN Member States and ASEAN's FTA Partners. RCEP will cover trade in goods, trade in services, investment, economic and technical cooperation, intellectual property, competition, dispute settlement and other issues.

Negotiations for the RCEP will recognize ASEAN Centrality in the emerging regional economic architecture and the interests of ASEAN's FTA Partners in supporting and contributing to economic integration, equitable economic development and strengthening economic cooperation among the participating countries.

RCEP negotiations will be guided by the following principles:

1. The RCEP will be consistent with the WTO, including GATT Article XXIV and GATS Article V.
2. The RCEP will have broader and deeper engagement with significant improvements over the existing ASEAN+1 FTAs, while recognizing the individual and diverse circumstances of the participating countries.
3. The RCEP will include provisions to facilitate trade and investment and to enhance transparency in trade and investment relations between the participating countries, as well as to facilitate the participating countries' engagement in global and regional supply chains.
1. Taking into consideration the different levels of development of the participating countries, the RCEP will include appropriate forms of flexibility including provision for special and differential treatment, plus additional flexibility to the least-developed ASEAN Member States, consistent with the existing ASEAN+1 FTAs, as applicable.
5. The ASEAN+1 FTAs and the bilateral/plurilateral FTAs between and among participating countries will continue to exist and no provision in the RCEP agreement will detract from the terms and conditions in these bilateral/plurilateral FTAs between and among the participating countries.
6. Any ASEAN FTA Partner that did not participate in the RCEP negotiations at the outset would be allowed to join the negotiations, subject to terms and conditions that would be agreed with all other participating countries. The RCEP agreement will also have an open accession clause to enable the participation of any ASEAN

FTA partner that did not participate in the RCEP negotiations and any other external economic partners after the completion of the RCEP negotiations.

7. Provisions for technical assistance and capacity building may be made available, building upon the ASEAN+1 FTAs, to the developing and least-developed countries participating in the RCEP to enable all parties to fully participate in the negotiations, implement obligations under the RCEP and enjoy the benefits from the RCEP.
8. The negotiations on trade in goods, trade in services, investment and other areas will be conducted in parallel to ensure a comprehensive and balanced outcome.

I. TRADE IN GOODS

The RCEP will aim at progressively eliminating tariff and non-tariff barriers on substantially all trade in goods in order to establish a free trade area among the parties.

Tariff negotiations will be conducted on a comprehensive basis. Such negotiations should aim to achieve the high level of tariff liberalization, through building upon the existing liberalization levels between RCEP participating countries and through tariff elimination on a high percentage of both tariff lines and trade value. The scheduling of tariff commitments should seek to maximize the benefits of regional economic integration.

Priority will be attached to early tariff elimination on products of interest to the least developed ASEAN Member States.

II. TRADE IN SERVICES

The RCEP will be comprehensive, of high quality and substantially eliminate restrictions and/or discriminatory measures with respect to trade in services between the RCEP participating countries.

Rules and obligations on trade in services under the RCEP will be consistent with the General Agreement on Trade in Services (GATS) and will be directed towards achieving liberalization commitments building on the RCEP participating countries' commitments under the GATS and the ASEAN+1 FTAs. All sectors and modes of supply will be subject to negotiations.

III. INVESTMENT

The RCEP will aim at creating a liberal, facilitative, and competitive investment environment in the region. Negotiations for investment under the RCEP will cover the four pillars of promotion, protection, facilitation and liberalization.

IV. ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION

Economic and technical cooperation under the RCEP will aim at narrowing development gaps among the parties and maximizing mutual benefits from the implementation of the RCEP agreement. The economic and technical cooperation provisions in the RCEP will build upon existing economic cooperation arrangements between ASEAN and ASEAN's FTA partners participating in the RCEP. Cooperation activities should include electronic commerce and other areas that would be mutually agreed upon by the RCEP participating countries.

V. INTELLECTUAL PROPERTY

The text on intellectual property in the RCEP will aim to reduce IP-related barriers to trade and investment by promoting economic integration and cooperation in the utilization, protection and enforcement of intellectual property rights.

VI. COMPETITION

Provisions on competition will form the basis for parties to cooperate in the promotion of competition, economic efficiency, consumer welfare and the curtailment of anti-competitive practices while cognizant of the significant differences in the capacity and national regimes of RCEP participating countries in the area of competition.

VII. DISPUTE SETTLEMENT

The RCEP will include a dispute settlement mechanism that would provide an effective, efficient and transparent process for consultations and dispute resolution.

VIII. OTHER ISSUES

The RCEP negotiations will consider including other issues covered by FTAs among RCEP participating countries, which may be identified and mutually agreed in the course of negotiations, and take into account new and emerging issues relevant to business realities.

The RCEP negotiations will commence in early 2013 and aim to complete by end-2015.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Sumber: (Australian Government, 2016)

B. RCEP Dalam Regionalisme dan Perdagangan Internasional

Berdasarkan laporan Asian Development Bank (ADB) pada tahun 2008, ekonomi Asia menunjukkan peningkatan dan telah menjadi sangat vital bagi Asia itu sendiri dan juga bagi dunia. Total pengeluaran Asia saat ini lebih kurang setara dengan Eropa maupun Amerika Utara, dan diperkirakan akan meningkat sebanyak 50% pada tahun 2020, dalam konteks keseimbangan daya beli. Terlebih lagi, baik Amerika Serikat dan Eropa saat ini terus mengalami penurunan GDP sebanyak 1% hingga 2,5% setiap tahunnya. Pusat pertumbuhan ekonomi saat ini telah bergeser ke Asia. Hal ini semakin terlihat saat pertemuan ASEAN pada November 2012, ketika Asia menemukan dua pendekatan yang berbeda menuju liberalisasi perdagangan. Pertama adalah Regional Comprehensive Economic Partnership yang dipimpin oleh ASEAN dan kedua adalah Trans-Pacific Partnership yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Kehadiran kerjasama perdagangan regional seperti RCEP dan TPP diharapkan mampu untuk mendukung terbentuknya jaringan produksi internasional. RCEP dan TPP disebut akan memberikan perhatian lebih kepada sektor jasa tertentu, seperti transportasi, telekomunikasi, ICT, logistic dan jasa finansial, yang mana hal ini akan berkontribusi terhadap terbentuknya jaringan produksi dan distribusi internasional.

Terdapat beberapa alasan mengapa pengimplementasian RCEP dapat membantu meningkatkan pendapatan ekonomi Asia. Pertama, RCEP dapat membantu untuk meregionalisasi rantai persediaan yang akan membuat Asia sebagai pabrik terbesar dunia. Kedua, apabila peraturan regional terbaru sejalan

dengan perjanjian WTO berkaitan tentang barang dan jasa, RCEP dapat membantu mengurangi munculnya sentiment proteksionisme dalam ekonomi global. Ketiga, dalam area putaran investasi, RCEP akan mempromosikan arus FDI dan transfer pengetahuan dari MNC yang lebih mudah. Keempat, dengan menyederhanakan aturan-aturan perdagangan, RCEP juga akan mengurangi dampak dari adanya FTA di Asia yang tumpang tindih. Kelima, meruntuhkan hambatan perdagangan barang dan jasa akan menyediakan barang-barang konsumen dan makanan impor yang lebih murah, yang mana hal ini akan menguntungkan bagi konsumen dan masyarakat menengah kebawah (Wignaraja, 2017).

Tabel 2. 1. Pentingnya RCEP dalam EKonomi Global

Measure	Magnitude	Share of World
Population	3.4 billion people	48.8% (2013)
GDP (Current)	US\$ 21.3 trillion	28.7% (2013)
Trade (Goods and Services and Imports	US\$ 12. 1 trillion	27.0% (2012)
FDI Inflow	US\$ 329.4 billio	24.4% (2012)

Sumber: (Wignaraja, 2017)

Hal yang kian menjadi perhatian adalah kemungkinan akan adanya persaingan antara RCEP dan TPP sebagai sebuah perjanjian regional yang memiliki kesamaan tujuan dalam liberalisasi dan integrasi ekonomi. RCEP dan TPP juga kemungkinan akan berada dalam konflik sebagai akibat dari adanya rivalitas antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat China. Selain itu, tiap persaingan antara kedua kerja sama ini akan berakibat perpecahan diantara negara-negara ASEAN, hal ini akan menurunkan peran sentral ASEAN di kawasan tersebut.

Dalam menjalankan kebijakan FTA-nya ASEAN tidak memiliki standar yang baku. Dalam perdagangan barang, contohnya, ASEAN dan keenam mitra

FTA-nya bukan hanya menerapkan tariff yang berbeda akan tetapi juga menerapkan jadwal yang berbeda terhadap negara yang berbeda. Sebagai tambahan, konsesi tariff dari negara yang sama dapat berbeda tergantung pada FTA-nya, dan rata-rata pengurangan tarif berbeda diseluruh FTA ASEAN+1.

Untuk beberapa tahun kedepan ASEAN akan mengalami peningkatan dalam integrasi regional. Baik RCEP dan TPP merupakan perjanjian kerja sama regional yang ambisius, yang akan melibatkan proses negosiasi yang kompleks dengan beragam pihak pada tingkatan pembangunan ekonomi yang berbeda dan sektor-sektor yang kemungkinan belum memiliki persiapan dalam menghadapi liberalisasi.

Pembentukan kerjasama ekonomi regional dapat dipahami sebagai sebuah persaingan untuk memperoleh kendali baik terhadap keanggotaan dan agenda dari kerja sama tersebut. Kendali terhadap keanggotaan berperan penting untuk memilih negara mana yang akan dilibatkan kedalam kerangka kerja sama tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengasingkan negara-negara pesaing yang berpotensi untuk menjadi pemimpin dari kerjasama yang akan dijalin. Pengendalian agenda diperlukan bagi pemimpin dari kerjasama yang akan dijalin untuk menegaskan kepemimpinan dalam proses negosiasi yang sedang berjalan.

C. Keterlibatan China Dalam RCEP

Pada subbab ini penulis akan menguraikan mengenai keterlibatan China dalam kerangka kerjasama RCEP. Pembahasan dalam subbab ini akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu; 1. RCEP dalam perspektif China, yang akan membahas

mengenai RCEP dalam pandangan China; 2. Peran serta tantangan yang dihadapi China dalam proses negosiasi kerjasama RCEP.

1. RCEP Dalam Perspektif China

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) adalah sebuah kerjasama perdagangan bebas yang sedang dalam proses negosiasi antara negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara mitra perdagangan bebas ASEAN. Setelah dirampungkan, kerjasama ini akan menaungi 16 negara, yang mewakili 45% populasi dunia.

RCEP pertama kali diluncurkan pada ASEAN Summits ke-21 di Phnom Penh, Kamboja pada tahun 2012. Negosiasi untuk kerja sama ini kemudian dimulai pada tahun 2013. Tujuan awal RCEP adalah untuk menjadi sebuah kerangka kerja sama yang dipimpin ASEAN yang kemudian hal ini akan mengembangkan serta memperdalam hubungan ekonomi ASEAN dengan negara-negara mitra perdagangan bebas-nya. RCEP akan membawa ASEAN menuju integrasi ekonomi yang lebih besar, mendukung pembangunan ekonomi yang adil dan memperkuat kerja sama ekonomi diantara negara-negara yang terlibat.

RCEP memiliki potensi untuk merubah kawasan Asia menjadi sebuah pasar yang terintegrasi dengan populasi lebih dari tiga juta jiwa (lebih dari 45% populasi dunia) dengan total GDP sekitar US\$ 17,23 triliun (Singapore, 2014).

RCEP akan berusaha untuk mempromosikan integrasi ekonomi regional yang lebih besar, akan menghilangkan hambatan tariff maupun non-tarif secara progresif., dan pada saat yang bersamaan memastikan konsistensi terhadap peraturan WTO. RCEP diharapkan akan memperdalam integrasi kawasan melalui

liberalisasi perdagangan jasa, investasi, harmonisasi kebijakan, peraturan dan standar kebijakan perdagangan. Meskipun integrasi ekonomi yang berorientasi pasar telah berkontribusi banyak bagi jaringan produksi dan rantai persediaan di Asia Timur, masih banyak hal yang perlu diperhatikan seperti adanya peraturan daerah yang tidak kompatibel, regulasi yang diskriminatif dll.

RCEP diperkirakan akan menjadi sebuah upaya baru untuk meningkatkan model kerja sama perdagangan bebas baru di kawasan Asia Timur. Dengan mempertimbangkan selisih pembangunan yang lebar di Asia Timur, maka kecil kemungkinan bagi sebuah kerja sama perdagangan bebas dengan standar tinggi untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda bagi tiap negara di kawasan. Penanganan yang fleksibel dan berbeda mungkin dibutuhkan untuk memudahkan negara kurang berkembang.

China menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap RCEP. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usaha yang telah dilakukan oleh China. China berniat untuk memainkan peran aktif dalam mempromosikan percepatan proses negosiasi RCEP dan akan memimpin jalannya negosiasi serta mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam proses negosiasi.

Terdapat tiga faktor pendorong yang menjadi motivasi bagi China untuk mengambil peran aktif dalam proses finalisasi negosiasi RCEP. Pertama, China berusaha untuk menjadikan RCEP sebagai sebuah komponen kunci dalam desain integrasi regional-nya sebagai sebuah respon yang strategis terhadap TPP yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Kedua, China menyatu dalam negosiasi RCEP sembari lebih merefleksikan preferensi domestic yang beragam yang dapat memperkuat suara mereka serta memicu perdebatan soal peran dan identitas

regional China. Ketiga, China mengembangkan norma-norma yang diakui secara regional melalui proses kooperatif jangka panjang, hal ini menjadikan inisiatif di regional menjadi sah dan sukses.

Ketiga faktor yang mempengaruhi sikap China terhadap RCEP itu lebih berkaitan dengan kebijakan politik dan strategis ketimbang ekonomi. Sebagai tambahan, dalam tiga dimensi tersebut proses perundingan yang dilakukan secara berkelanjutan memiliki signifikansi yang besar. China menggunakan RCEP sebagai upaya untuk melawan upaya Amerika Serikat untuk memperoleh dominasi di kawasan Asia-Pasifik dengan menggabungkan diplomasi ekonomi dan strategi militer serta beberapa *soft diplomacy* lainnya.

Untuk saat ini, China perlu menawarkan jumlah subsidi yang cukup kepada kawasan sebagai upaya untuk memperoleh kepemimpinan di kawasan yang akan menunjukkan kemampuan China serta menjadi hegemoni di dalam kawasan. Dalam hal ini, RCEP akan menunjukkan bagaimana China mengambil peran hegemoni dalam kawasan, hal ini sangat erat kaitannya dengan strategi besar China yang menempatkan Asia sebagai prioritas utamanya (Tae-Kyung, 2015).

2. Peran China Dalam Proses Negosiasi RCEP

Dalam beberapa tahun belakangan ini, China semakin gencar terlibat aktif dalam berbagai perdagangan bilateral dan multilateral. Hal ini sesuai dengan tujuan yang telah diupayakan China yaitu untuk memperdalam reformasi serta keterbukaan ekonominya.

Salah satu kerjasama perdagangan multilateral yang diikuti oleh China adalah RCEP. Kerjasama RCEP dinilai penting oleh China. Sejak awal

keterlibatannya, China telah mengatakan akan berperan aktif didalam proses perundingan kerjasama RCEP ini.

Dengan berpartisipasi didalam RCEP, banyak pengamat yang mengatakan bahwa China akan mendapatkan sebuah kesempatan yang besar untuk dapat menyusun kembali aturan-aturan bagi perdagangan global (Reuters, 2016).

Partisipasi aktif China serta tindakannya mendorong negara-negara lain yang terlibat untuk segera mencapai kata sepakat dalam proses perundingan ini sangat menguntungkan bagi China. Hal ini akan bermanfaat bagi China untuk membentuk sebuah kawasan perdagangan bebas dengan standar tinggi yang akan memberikan keuntungan ekonomis dan politis yang lebih besar, yang mana ini merupakan strategi kepentingan China. Sebagai negara terbesar dalam proses negosiasi RCEP, China mampu dan bertanggungjawab untuk memainkan peranan penting dalam proses negosiasi tersebut. China juga bertujuan untuk mempercepat proses negosiasi secara aktif dan positif.

China telah mendorong negara-negara lain yang tergabung kedalam kerangka kerjasama RCEP untuk mempercepat pelaksanaan proses perundingan kerjasama tersebut. Menurut China, RCEP yang meliputi Australia, India dan lebih dari selusin negara-negara lain ini merupakan satu-satunya jalan untuk tercapainya Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) yang lebih luas. Oleh sebab itu, selain berperan aktif dalam proses negosiasi RCEP, China juga sangat gencar dalam mempromosikan kerjasama RCEP. Langkah ini dianggap sebagai poin penting untuk mempercepat penerapan strategi FTA China dan mempermudah terciptanya jaringan FTA yang berstandar tinggi

Dalam proses perundingan RCEP yang saat ini masih terus bergulir, China secara aktif selalu terlibat dalam proses perundingan tersebut. China juga selalu berupaya untuk mempercepat tercapainya kata sepakat diantara negara-negara yang terlibat dalam kerangka kerjasama RCEP.

Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan serta ketidaksepemahaman dalam negosiasi, China berusaha untuk memperkuat komunikasi diantara semua anggota, mencari kesepakatan bersama sembari mengatasi perbedaan dibawah peraturan yang lebih fleksibel, dan bersama-sama anggota lain mencari solusi cerdas dengan pemikiran yang kreatif.

Ketertarikan China terhadap RCEP yang semakin memnigkat dapat dilihat dari betapa serius upaya yang telah dilakukan untuk mempromosikan RCEP. Pada proses negosiasi RCEP yang sampai saat ini masih berlangsung, China sangat terlihat jelas berupaya untuk mengambil kepemimpinan pada proses negoasiasi tersebut. Meskipun china selalu membantah hal ini dengan mengatakan bahwa ASEAN adalah pemimpin sekaligus inisiator dari kerja sama perdagangan bebas ini. Upaya China ini tentunya tidak mudah mengingat terdapat banyak tantangan bagi China untuk mengambil kepemimpinan pada RCEP.

Tantangan yang pertama, adanya efek “*Spaghetti Bowl*” yang sangat besar didalam RCEP, khususnya untuk integrasi FTA. Terdapat lima “10+1”: China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru yang semuanya memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN. Perbedaan dalam perdagangan jasa dan investasi serta dibeberapa area lainnya juga tercatat dalam FTA tersebut. Didalam ASEAN, negara-negara anggota juga mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang beragam dalam kebijakan liberalisasi masing-masing negara. Oleh

karena itu, hal ini menjadi sebuah tantangan yang sangat besar bagi pengembangan liberalisasi perdagangan dan investasi yang terintegasi ditengah kompleksitas FTA di Asia Timur.

Kedua, negara-negara yang berpartisipasi menemui hambatan lainnya yang diakibatkan oleh adanya masalah sejarah, klaim kedaulatan, dan kurangnya kepercayaan politik. Sebagai contoh, China dan Jepang memiliki masalah atas pulau Diaoyu dan masalah sejarah selama Perang Dunia II, yang mana hal ini hampir saja menghentikan negosiasi FTA antara China-Jepang-Korea Selatan. China memiliki konflik dengan Filipina dan Vietnam atas Laut China Selatan, yang kemungkinan akan meningkatkan nasionalisme di kedua negara tersebut. Hasilnya, hal itu mungkin saja dapat menyebabkan kedua negara tersebut untuk berpaling dari China dan mencari perlindungan dari Amerika Serikat dengan bergabung dalam TPP. Sebagai tambahan, juga terdapat beberapa konflik territorial antara China dan India, antara China dan Korea Selatan serta antara China dan Jepang. Bagaimana cara negara-negara ini untuk menyikapi konflik-konflik territorial ini dan membangun *mutual political trust* akan mempengaruhi proses negosiasi RCEP.

Ketiga, RCEP bersaing dengan TPP. Apabila TPP memiliki lebih banyak anggota dari Asia, maka hal itu akan membawa pengaruh negative bagi negosiasi RCEP. Hal itu jelas merusak sumber daya negosiasi dengan adanya pengimplementasian aturan-aturan baru dari TPP di negara-negara Asia. Ketika TPP sukses, maka RCEP dengan keterbukaan yang relative rendah akan menjadi tidak menarik.

Meskipun demikian, kita harus tetap ingat bahwa TPP dan RCEP telah dianggap sebagai dua jalur utama menuju integrasi ekonomi di kawasan Asia-

Pasifik. FTAAP merupakan tujuan jangka panjang dari APEC, TPP dan RCEP merupakan dua jalur utama yang mengarah pada tujuan tersebut. Dari dua jalur tersebut, RCEP merupakan kerja sama regional Asia yang disebut sebagai “*East Asia Model*” mengacu pada peran kunci dari “10+3”, sementara TPP dikenal sebagai “*Asia-Pacific Model*” yang menampung negara anggota baik dari Asia dan Amerika (Li & Hu, 2014).